

KEDAULATAN RAKYAT

15 JANUARI 2013



Analisis Memimpin dengan Empati

Oleh
Dr W Riawan Tjandra

GAYA Jokowi dalam memimpin kini seakan-akan membuka fase baru gaya kepemimpinan publik dan dijadikan model manajemen kepemimpinan oleh banyak pihak. Tak urung, model manajemen *blusukan* Jokowi juga bahkan diikuti oleh SBY saat mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sejak memimpin kota Solo dengan karakter kepemimpinannya yang berpihak kepada kelompok marginal serta kelompok usaha kecil dan menengah ditambah keberaniannya untuk memotong SOP anggaran yang selama ini cenderung bias elite menjadi berpihak kepada kelompok miskin, Jokowi telah membalikkan model kepemimpinan yang bertumpu pada pencitraan menjadi kepemimpinan dengan empati.

Jokowi yang oleh The City Mayors Foundation dimasukkan ke dalam 25 nominasi walikota terbaik dunia terlepas dari pro-kontra terhadap gaya kepemimpinannya, tak urung telah membuka mata banyak kalangan bahwa di negeri ini masih ada pemimpin yang memiliki sikap empati terhadap penderitaan mayoritas rakyatnya yang masih berkubang di lembah kemiskinan. Di saat para pemimpin satu demi satu berjatuh-hatuh terjatuh skandal korupsi, Jokowi justru pernah menolak menerima gaji sebagai Walikota

* Bersambung hal 7 kol 4

Memimpin

Solo dan memilih untuk memfokuskan pengabdianya kepada rakyatnya dengan isu anggaran yang berpihak kepada wong cilik (*pro poor budget*).

Daripada sibuk melakukan studi banding ke berbagai negara seperti gaya sebagian besar elite politik di DPR dan DPD, Jokowi memilih untuk melaksanakan program-program konkrit untuk memberdayakan rakyatnya di DKI. Di antaranya melalui kartu pintar dan kartu sehat, dua isu program yang langsung menyentuh kebutuhan mendasar rakyat dan selama ini banyak diabaikan para pemimpin pasca terpilih melalui hajatan pemilukada, pilpres atau pileg.

Pasal 33 UUD Negara RI 1945 menjadi wadah konstitusional atas konsep negara kesejahteraan yang memberikan mandat kepada negara cq pemerintah untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam konstelasi sistem ketatanegaraan tersebut apa yang dilaksanakan Jokowi-Basuki di Provinsi DKI Jakarta dengan kartu pintar dan kartu sehat tak lain merupakan upaya konkrit untuk mengontekstualisasikan

mandat konstitusional untuk membangun sistem negara kesejahteraan bagi seluruh penguasa yang hadir di negeri ini.

Manajemen *blusukan* gaya Jokowi yang kini juga diduplikasi SBY dan entah siapa lagi nantinya, memiliki makna yang sangat dalam. Karena hal itu menegaskan bahwa negara masih ada melalui apa yang disebut dengan pemerintahan dengan empati. Hal itu ingin mengajak negeri ini beralih dari fase kepemimpinan dengan pesona dan citra memasuki fase memimpin dengan hati. Warga DKI tentu maklum bahwa masalah klasik banjir dan kemacetan tidak mudah diatasi semudah membalik telapak tangan. Namun rakyat merasakan kehadiran sang pemimpin di saat mereka mengalami penderitaan akibat beban ekonomi politik, faktor struktur geospasial, keadaan alam atau kesehatan. Hal-hal semacam itu yang selama ini absen dalam kehidupan sosial yang dialami rakyat. Kebanyakan pemimpin maupun elite politik sibuk mengkalkulasi suara/angka menjelang pemilihan dan selanjutnya hanya sibuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya pascaterpilih. Rakyat hanya di-

Sambungan hal 1

lihat dalam kalkulasi suara atau angka statistik yang nasibnya tak jarang berakhir dengan tragis di kotak-kotak suara dalam pemilu.

Gaya kepemimpinan dengan hati dan empati sebenarnya sudah menjadi bagian dari sejarah kultural di negeri ketika menengok perjalanan politik Soekarno-Hatta, Sri Sultan HB IX dan para *founding fathers and mothers* negeri ini. Maka, manajemen *blusukan* dan gaya kepemimpinan yang bersatu jiwa dengan rakyatnya dalam sebuah 'demokrasi desa' sebenarnya adalah hakikat kepemimpinan yang sudah dicita-citakan sejak republik ini dideklarasikan dan dikonstitusikan dalam UUD 1945. Pesona manajemen citra telah tergantikan dengan manajemen dengan hati dan empati, sebuah gaya kepemimpinan transformasional yang memanusiasikan manusia yang dipimpinnya dalam sebuah keadaban publik yang santun, lugas dan jujur.

(Penulis aktivis pengembangan dan pembaruan desa, dosen FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Associate Researcher pada IRE-Yogyakarta)-b